

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, memberikan perhatian terhadap kapasitas tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, mencakup keadilan (*equity*), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan akhirnya pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. Kapasitas apapun yang tercapai akan cepat punah, kecuali jika kita mengetahui dan menangani masalah kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber daya yang ada (Coralie Bryant, 1987).

Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Untuk mengelola suatu program pembangunan tidaklah mudah, diperlukan ketepatan perencanaan setelah melalui serangkaian identifikasi terhadap kebutuhan yang melibatkan berbagai pihak dan elemen dalam masyarakat yang terkait yaitu pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pembangunan diemban oleh departemen terkait, pemerintah daerah, petani, masyarakat, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi lintas institusi merupakan elemen pokok dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan oleh negara maupun pihak swasta tidak hanya menciptakan perbaikan-perbaikan sesuai yang diinginkan oleh undang-undang, namun juga mengakibatkan dampak negatif yang dapat merugikan

masyarakat. Pembangunan melahirkan berbagai permasalahan sosial atau yang sering disebut sebagai distorsi dalam kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa pembangunan tidak menciptakan perubahan kebaikan dalam kehidupan masyarakat, namun sebaliknya, masyarakat menghadapi problematika yang pelik seperti terjatuh dalam kemiskinan, tidak berdaya bahkan semakin lemah kondisi perekonomian maupun sosialnya. Pembangunan seharusnya ditujukan kepada masyarakat yang ekonominya berada dalam keadaan yang terpuruk dan lemah agar terentaskan dari kemiskinan, namun kenyataannya saat ini, pembangunan hanya dinikmati oleh mereka yang sudah mapan untuk terus memperkaya diri.

Minimnya solusi yang dihasilkan dalam menangani kompleksnya permasalahan yang timbul, banyak para ahli perencanaan yang mencurahkan perhatian pada suatu model pengembangan masyarakat dengan basis konsep pemberdayaan masyarakat sebagai jawaban alternatif terbaik dalam menghadapi tantangan perencanaan saat ini. Sutoro Eko (2006) dalam Bancin (2011), misalnya yang mengangkat studi komprehensif Adelman dan Morris (1978) di 74 negara, menyimpulkan bahwa “program-program pembangunan yang direncanakan secara terpusat (*top down*) seringkali tidak sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat bawah sebagai tujuan pembangunan itu sendiri”. Bahkan, sistem pendekatan *top-down* yang mengedepankan sisi pertumbuhan justru hanya menjadikan orang kaya semakin kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Karena itu, kritik dan kecaman terhadap doktrin pendekatan *top-down* ini terus mengalir yang akhirnya mengarah pada suatu gerakan pemberdayaan yang berpusat pada pembangunan masyarakat sebagai jawaban alternatif untuk menghadapi segala bentuk ketimpangan yang terjadi.

Menurut Christenson dan Robinson (1989), dalam Bancin (2011), pemberdayaan masyarakat adalah inti dan sekaligus tujuan dari setiap pengembangan masyarakat, yang mendudukan masyarakat sebagai subyek mandiri, sehingga dapat berperan serta dalam kegiatan pembangunan terutama dalam proses pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat ini, lanjutnya, tidaklah hanya pada pelaksanaan semata tetapi meliputi semua mekanisme pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemeliharaan, dan pengembangan program selanjutnya. Pengembangan masyarakat ini harus

dipandang sebagai konsep yang mengandalkan sinergi potensi dari masyarakat yang solid dan berdaya dan memerlukan pemberdayaan sebagai alat untuk mencapai tujuannya, dengan demikian, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Melihat hal tersebut, maka perencanaan pembangunan saat ini harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong lahirnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari program-program pemberdayaan yang belakangan ini digalakkan oleh pemerintah dan swasta (perusahaan).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki beberapa peran penting untuk turut mensukseskan program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Salah satu peran tersebut adalah dengan menjalankan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Suharto, 2005). Keberadaan perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial tersebut sering dikenal dengan sebutan CSR, sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan, guna membangun citra positif perusahaan.

Urgensi program CSR ini di Indonesia semakin dipertegas dengan dikeluarkannya UU No.40 Tahun 2007 pasal 74 bab V tentang perseroan terbatas sebagai pengganti UU No.2 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3587). Dalam rangka pelaksanaannya yang mengadopsi konsep CSR di dalamnya, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan Peraturan Menteri No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pelaksanaan CSR di Indonesia telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan, namun penelitian yang bertujuan untuk menganalisa prinsip-prinsip

pemberdayaan masih terbilang sedikit. Matthew (1973) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Leagans (1961) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) menilai bahwa setiap fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang fasilitator tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

## **B. Perumusan Masalah**

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Tiga tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang ditemui dalam program pemberdayaan seperti diantaranya program yang tidak tepat sasaran, program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat yang rendah dalam program, dan lain sebagainya. Untuk itu penyelenggara program-program pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan programnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemeliharaan, dan pengembangan program.

Perusahaan sebagai salah satu penyelenggara program pemberdayaan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial (CSR). CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Wibisono

dalam Marya, 2012). Sedangkan menurut Nursahid (2006) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi *stakeholder* yang terkena pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung dari operasi perusahaan.

Berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan CSR di Indonesia baik dari masyarakat, pemerintah maupun perusahaan. Kadang masyarakat belum siap mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif, masyarakat tidak mau diajak berubah dan hanya ingin mendapatkan bantuan dana saja (filantropi) serta *cultur* dan terkadang *capacity building* ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan. Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya untuk meningkatkan *image* perusahaan, bahkan ada beberapa perusahaan yang sama kali tidak mau menjalankan CSR.

Salah satu perusahaan yang sedang melaksanakan program CSR adalah PT. Pertamina. PT. Pertamina merupakan perusahaan milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri minyak dan gas yang telah mengimplementasikan CSR dalam menjalankan usahanya. CSR PT. Pertamina merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kebijakan dan kegiatan-kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan beretika. Berbagai program CSR telah dilaksanakan oleh PT. Pertamina kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007, kegiatan CSR Pertamina secara umum terbagi atas :

1. Pertamina dan Kesehatan, yaitu program yang bertujuan untuk memperhatikan pentingnya kesehatan anak, Pertamina bekerjasama dengan yayasan sosial yang khusus bergerak menangani anak penderita cacat wajah dan kasus bibir sumbing.
2. Pertamina dan Lingkungan, yaitu program yang ditujukan sebagai komitmen manajemen dalam rangka tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan pelestarian alam.
3. Pertamina dan Masyarakat, yaitu program yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dan Program Pertamina Peduli Bencana Alam.

4. Pertamina dan Pendidikan, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan untuk peningkatan akses komunitas terhadap pendidikan di tanah air.

Pada tahun 2016 salah satu kegiatan CSR PT Pertamina yang berwawasan pelestarian lingkungan adalah melakukan upaya peningkatan pelestarian lingkungan dengan penanaman 2000 pohon langka jenis gaharu di Hutan Nagari Sungai Buluh Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan penanaman 2000 pohon gaharu akan dilakukan secara bertahap. Dan pada tahun 2017 kegiatan ini dilanjutkan dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Teh Gaharu dan Penyuntikan Gaharu. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu penyuluhan tentang tanaman yang meliputi pembibitan, penyuntik pohon gaharu, dan pengolahan daun gaharu mejadi teh gaharu yang memiliki khasiat untuk tubuh dan bernilai ekonomis yang menjanjikan. Dari setiap kegiatan yang telah dilakukan diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai tanaman gaharu bertambah, serta masyarakat dapat memanfaatkan olahan gaharu sebagai sumber pendapatan bagi mereka.

Sebagai proses, pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh fasilitator pemberdayaan dalam melakukan kegiatannya. Begitu juga halnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina semestinya menurut prinsip-prinsip pemberdayaan dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program sehingga tujuan dari pemberdayaan akan tercapai sesuai dengan harapan. Kajian yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada CSR PT. Pertamina ini belum ada dilakukan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimanakah perencanaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dalam CSR PT. Pertamina?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam CSR PT. Pertamina?

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisa Pemberdayaan Masyarakat dalam**

***Corporate Sosial Responsability (CSR) PT. Pertamina Berwawasan Pelestarian Lingkungan di Nagari Sungai Buluh Timur Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman”***

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dalam CSR PT. Pertamina
2. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam CSR PT. Pertamina

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian bagi berbagai pihak, yaitu :

1. **Pengambilan Kebijakan**  
Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kondisi di Nagari Sungai Buluh Timur yang merupakan tempat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam CSR PT. Pertamina sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. **Kelompok Sasaran**  
Bagi kelompok sasaran, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan agar kedepannya kelompok bisa lebih baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
3. **Ilmu Pengetahuan**  
Secara umum diharapkan hasil penelitian ini melengkapi kajian tentang pemberdayaan masyarakat, serta sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.